

**Analisis Pembagian Hasil Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan
(Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh)**
*(Distribution Analysis of Results and Household Food Security Fishermen
(Case Study Lampulo fishing port of Banda Aceh))*

Linda Dwi Rejeki¹, Suyanti Kasimin¹, Teuku Fauzi¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala

Abstrak- Pendapatan yang diterima di Pelabuhan Perikanan Lampulo berdasarkan sistem pembagian hasil, menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 bahwa nelayan pemilik mendapatkan 60% dan nelayan penggarap mendapat 40% dari sistem bagi hasil. Pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ABK sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga ABK. Adapun indikator dalam melihat kondisi ketahanan pangan rumah tangga dengan mengalikan proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga ABK dengan konsumsi energi rumah tangga ABK. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui besarnya persentase pembagian hasil yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan Lampulo antara nelayan pemilik (Tauke Kapal dan Tauke Bangku) dan nelayan penggarap (Kapten Kapal dan ABK) serta bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga ABK. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode survei. Analisis data yang digunakan untuk sistem pembagian hasil ialah dengan menggunakan rumus penerimaan total, rumus pendapatan dan persentase pembagian hasil sedangkan analisis data yang digunakan untuk ketahanan pangan ialah menggunakan pengukuran derajat ketahanan pangan dengan mengalikan proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga ABK dengan konsumsi energi rumah tangga ABK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase pembagian hasil yang diterima nelayan pemilik sebesar 64% dan nelayan penggarap sebesar 36%, sedangkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga ABK di Pelabuhan Perikanan Lampulo ialah kategori rawan pangan dengan proporsi pengeluaran pangan sebesar 69% dan konsumsi energi sebesar 61%.

Kata Kunci: Sistem Pembagian Hasil, Ketahanan Pangan, Proporsi Pengeluaran Pangan dan Konsumsi Energi.

Abstract - The revenue received in Lampulo Fishing Port based on law no. 16 in 1964 show that the owners get 60% and the smallholders gain 40% of revenue sharing. The income is used to fulfill the household needs of the crews as an effort to boost up their level of food security. The indicator which can be used to determine the food security level is by multiplying the proportion of food expenditure to total expenditure of each crew with energy consumption. This study was conducted to find out the percentage of revenue sharing implemented by Lampulo Fishing Port between fishermen and the boat owners (Tauke Kapal and Tauke Bangku) and smallholders or workers (boat captain and crews) and it is also expected to figure out the household food security of the crews. The study was conducted at Lampulo Fishing Port and for the purpose of data collection, the researcher used survey method. The data then were analyzed using total revenue formula, revenue formula, and revenue sharing percentage. Meanwhile, to analyze food security the researcher used the measurement of the degree of food security by multiplying the proportion of food expenditure to total expenditure of crews' household with energy consumption of each crew household. The results of the study show that the average percentage of revenue sharing received by the boat owners is 64% and smallholder/ workers is 36%. Furthermore, the level of household food security of the boat crews at Lampulo Fishing Port is categorized as food insecurity with the proportion of food expenditure by 69% and energy consumption by 61%.

Keywords: Revenue Sharing Sistem, Food Security, Food Expenditure Proportion, and Energy Consumption.

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan Lampulo merupakan pelabuhan perikanan terbesar yang berada di Kota Banda Aceh. Kehadiran Pelabuhan Perikanan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat nelayan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi bagi keluarganya (Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, 2015). Tetapi, jika dilihat dari perekonomian nelayan terutama dari nelayan ABK (Anak Buah Kapal) kehidupannya tidak begitu sejahtera dikarenakan pola bagi hasil yang diterapkan di Pelabuhan Perikanan tersebut tidak ada sistem baku karena kapal yang tersedia milik perseorangan. Sistem bagi hasilnya disepakati antara Pemilik Kapal, Pemilik Modal dan Kapten Kapal. Dari hasil produksi dan nilai transaksi ikan di Pelabuhan Perikanan Lampulo adanya peningkatan setiap tahunnya seperti yang di gambarkan pada Tabel di bawah ini: Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai transaksi ikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan dari nelayan karena sistem bagi hasil yang tidak baku menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan antara Tauke Kapal, Tauke Bangku, Kapten Kapal maupun ABK, sehingga pendapatan yang diterima ABK sangat kecil dari pola bagi hasil ini.

Sistem pembagian hasil menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1964 pada pasal 3 diatur jumlah proporsi antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap yaitu jika usaha penangkapan menggunakan perahu layar minimal nelayan penggarap memperoleh minimal 75% dari hasil bersih lalu jika usaha penangkapan menggunakan kapal motor minimal nelayan penggarap memperoleh 40% dari hasil bersih. Pada pasal 4 ditetapkan biaya beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap yaitu ongkos lelang atau retribusi, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik yaitu ongkos pemeliharaan dan perbaikan peahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

Tabel 1. Produksi Dan Nilai Transaksi Ikan Di Pelabuhan Perikanan Lampulo 2010-2015

Tahun	Produksi dan Nilai Transaksi			
	Rata-rata (perbulan)		Rata-rata (perhari)	
	Kg	Rp	Kg	Rp
2010	506.994	5.833.083.833	19.500	224.349.571
2011	568.961	8.494.924.125	21.883	326.727.851
2012	568.597	8.875.408.167	21.869	341.361.853
2013	755.010	9.499.826.917	29.039	365.377.958
2014	709.988	10.494.100.208	27.307	403.619.239
2015	984.620	14.082.632.429	37.870	541.639.709

Sumber: UPTD PP Lampulo 2010-2015

Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang No 18 tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun

mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kecukupan energi merupakan salah satu indikator untuk melihat ketahanan pangan dari suatu rumah tangga. Untuk provinsi Aceh masyarakatnya belum memenuhi standar kecukupan energi yang dianjurkan. Menurut survei badan ketahanan pangan provinsi Aceh diketahui bahwa anjuran energi yang harus dipenuhi oleh penduduk Aceh menurut Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 ialah 2.150 Kkal/Kapita/Hari. Pada tahun 2010 hingga 2014 konsumsi energi penduduk Aceh mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2010 sebesar 2177 Kkal/Kapita/Hari, tahun 2011 sebesar 2055 Kkal/Kapita/Hari, tahun 2012 sebesar 1960 Kkal/Kapita/Hari, tahun 2013 sebesar 1906 Kkal/Kapita/Hari dan tahun 2014 sebesar 1877 Kkal/Kapita/Hari. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nelayan dan pola konsumsinya. Jadi, pola konsumsi nelayan yang berbeda akan mempengaruhi kecukupan energi nelayan.

Persentase pembagian hasil akan menghasilkan pendapatan bagi nelayan atau itulah yang menjadi pengeluaran dari rumah tangga, pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam melihat ketahanan pangan rumah tangga. Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk karya tulis akhir yang berjudul “Analisis Pembagian Hasil Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan (Studi Kasus Pelabuhan Perikanan Lampulo Kota Banda Aceh)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode survei. Analisis data yang digunakan untuk sistem pembagian hasil ialah dengan menggunakan rumus penerimaan total, rumus pendapatan dan persentase pembagian hasil sedangkan analisis data yang digunakan untuk ketahanan pangan ialah menggunakan pengukuran derajat ketahanan pangan dengan mengalikan proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga ABK dengan konsumsi energi rumah tangga ABK.

Analisis Sistem Pembagian Hasil

Untuk menghitung penerimaan total yang diperoleh nelayan dari hasil tangkapan ikan digunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = Q \times P \dots\dots\dots(\text{Soekartawi, 2002})$$

Keterangan:

TR = Penerimaan Total (Total Revenue)

Q = Produksi

P = Harga

Setelah mendapatkan penerimaan total kemudian dapat mencari pendapatan bersih yang diterima dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi = PrT - B \dots \dots \dots (\text{Soekartawi, 2002})$$

Dijabarkan menjadi :

$$= PrT - (BO)$$

Keterangan:

- π = Pendapatan
- PrT = Nilai Hasil Tangkapan
- BO = Biaya Operasional

Setelah pendapatan bersih diperoleh maka selanjutnya membandingkan pendapatan bersih yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat dan diturunkan dalam model berikut ini:

- a) $\% \pi_A = \pi_A / TR \times 100$
- b) $\% \pi_B = \pi_B / TR \times 100$
- c) $\% \pi_C = \pi_C / TR \times 100$
- d) $\% \pi_D = \pi_D / TR \times 100$

Keterangan:

- $\% \pi_A$ = % Pendapatan untuk Tauke Kapal
- $\% \pi_B$ = % Pendapatan untuk Tauke Bangku
- $\% \pi_C$ = % Pendapatan untuk Kapten Kapal
- $\% \pi_D$ = % Pendapatan untuk ABK
- TR = Penerimaan total dari hasil penjualan ikan (Rp)

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan

1) Proporsi Pengeluaran Pangan

Untuk mengetahui Proporsi pengeluaran pangan rumah tangga nelayan maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$PF = \frac{PP}{TP} \times 100\%$$

Keterangan:

- PF = Proporsi pengeluaran pangan (%)
- PP = Pengeluaran untuk belanja pangan (Rp/bulan)
- TP = Total pengeluaran (Rp/bulan)

2) Konsumsi Energi

Untuk mengetahui konsumsi rumah tangga nelayan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TKE = \frac{\sum JE}{AKE} \times 100\%$$

Keterangan:

TKE : Tingkat kecukupan energi (%)

JE : Jumlah energi yang dikonsumsi (Kkal/Kapita/Hari)

AKE : Angka kecukupan energi yang dianjurkan (Kkal/Kapita/Hari)

Adapun daftar AKE berdasarkan umur dan jenis kelamin menurut WNPKG 2012 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Daftar AKE Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin Menurut WNPKG Tahun 2012

NO	Umur	AKE (Kkal/kapita/hari)
1.	Anak	
	0-5 Bulan	550
	6-11 Bulan	750
	1-3 Tahun	1050
	4-6 Tahun	1575
	7-9 Tahun	1790
2.	Pria	
	10-12 Tahun	2050
	13-15 Tahun	2550
	16-18 Tahun	2675
	19-29 Tahun	2725
	30-49 Tahun	2600
	50-64 Tahun	2325
	65-79 Tahun	1900
	80+ Tahun	1512
3.	Wanita	
	10-12 Tahun	2000
	13-15 Tahun	2125
	16-18 Tahun	2125
	19-29 Tahun	2250
	30-49 Tahun	2125
	50-64 Tahun	1900
	65-79 Tahun	1550
	80+ Tahun	1425
4.	Hamil (+an)	

	Trimester 1	180
	Trimester 2	300
	Trimester 3	300
5.	Menyusui (+an)	
	6 Bulan Pertama	330
	6 Bulan Kedua	400

Sumber: Hardinsyah (2011)

Tabel 2. di atas merupakan daftar AKE berdasarkan jenis kelamin dan umur. Konsumsi energi merupakan salah satu indikator dalam menghitung ketahanan pangan rumah tangga nelayan, berikut tabel pengukuran derajat ketahanan pangan:

Tabel 3. Pengukuran Derajat Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga

Konsumsi energi per unit ekuivalen dewasa	Proporsi pengeluaran pangan	
	Rendah (< 60 % pengeluaran total)	Tinggi (\geq 60 % pengeluaran total)
Cukup (> 80 % kecukupan energi)	Tahan pangan	Rentan pangan
Kurang (\leq 80 % kecukupan energi)	Kurang pangan	Rawan pangan

Sumber: Johnson and Toole yang diadopsi oleh Maxwell, S, dkk (2000) dalam Pramita (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan

1. Proporsi Pengeluaran Pangan Terhadap Pengeluaran Total Rumah Tangga ABK

Pada Tabel 4. menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 1.513.000/bulan, pengeluaran ini terdiri dari pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan.

Tabel 4. Proporsi Pengeluaran Pangan Terhadap Pengeluaran Total Rumah Tangga ABK Di Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp/Bulan)	Proporsi (%)
1.	Pengeluaran Pangan	1.036.000	69
2.	Pengeluaran Non Pangan	476.714	31
	Total	1.513.000	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Konsumsi Energi Rumah Tangga ABK

Tabel 5. Tingkat Konsumsi Energi Rumah Tangga ABK Di Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Konsumsi Energi	Kriteria	Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	> 80%	Cukup	0	0
2.	≤ 80%	Kurang	7	100
	Jumlah		7	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi rumah tangga ABK di Pelabuhan Perikanan Lampulo kurang energi karena energi yang dikonsumsi rumah tangga ABK sebesar 51% dan untuk per orang per hari hanya 49% dan tidak ada rumah tangga dengan kriteria cukup dalam mengkonsumsi energi yaitu sebesar > 80%.

Adapun sebaran ketahanan pangan rumah tangga ABK di Pelabuhan Perikanan Lampulo ialah sebagai berikut.

Tabel 6. Sebaran Ketahanan Pangan Rumah Tangga ABK Di Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Kategori Ketahanan Pangan	Jumlah Rumah Tangga	Persentase (%)
1.	Tahan Pangan, Jika Proporsi Pengeluaran Pangan Rendah (< 60%), TKE Cukup (> 80%)	-	-
2.	Kurang Pangan, Jika Proporsi Pengeluaran Pangan Rendah (< 60%), TKE Kurang (\leq 80%)	-	-
3.	Rentan Pangan, Jika Proporsi Pengeluaran Pangan Tinggi (\geq 80%), TKE Cukup (\geq 80%)	-	-
4.	Rawan Pangan, Jika Proporsi Pengeluaran Pangan Tinggi (\geq 60%), TKE Kurang (\leq 80%)	7	100
	Jumlah	7	100

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa 100% rumah tangga ABK yang menjadi sampel berstatus rawan pangan dengan proporsi pengeluaran pangan tinggi (\geq 60%) dan TKE kurang (\leq 80%). Proporsi pengeluaran pangan sebesar 61% dan konsumsi energi 59%.

Sistem Pembagian Hasil

Sistem pembagian hasil untuk setiap kapal di Pelabuhan Perikanan Lampulo berbeda-beda. Sistem pembagiannya tidak tertulis hanya berupa kesepakatan diantara Tauke Kapal, Tauke Bangku, Kapten Kapal dan ABK. Berikut akan di jelaskan pada Tabel 7 persentase sistem pembagian hasilnya

Tabel 7. Persentase Pembagian Hasil Di Pelabuhan Perikanan Lampulo

No	Nama Kapal	Hasil Penjualan Ikan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Bersih (Rp)	Persentase Pendapatan (%)			
					Tauke Kapal	Tauke Bangku	Kapten Kapal	ABK
1.	KM. Naifa	19.300.288	3.300.950	15.999.338	60	8	7	25
2.	KM. Sejahtera	8.749.944	1.157.400	7.592.544	65,5		5,8	28,7
3.	KM. Ilah Daya	16.450.336	1.266.750	15.183.586	63		5	32
4.	KM. Rayyan	15.450.148	3.268.550	12.181.598	62,4		6,3	31,3
5.	KM. Camar Laut	11.750.284	1.292.750	10.457.534	59	6	6	29
6.	KM. Sepakat	8.399.944	3.166.750	5.233.194	49	10	16	25
7.	KM. Syuhada	15.720.600	1.380.950	14.339.650	57,9	7,7	5,5	28,9
Rata-rata		13.688.792	2.119.157	11.569.635			7	29

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Pada Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata besarnya persentase pendapatan pada tahun 2016 di Pelabuhan Perikanan Lampulo ialah persentase Tauke Kapal untuk kapal KM. Naifa, KM. Camar Laut, KM. Sepakat dan KM. Syuhada sebesar 56,5%, persentase Tauke Bangku ialah 8%, sedangkan untuk kapal yang Tauke Kapal sekaligus menjadi Tauke Bangku ialah untuk kapal KM. Sejahtera, KM. Ilah Daya dan KM. Rayyan persentasenya ialah sebesar 64%, persentase Kapten Kapal 7% dan persentase ABK 29%. Jumlah ABK rata-rata 10 orang per kapal. Jadi 29% dibagi untuk masing-masing ABK per ABK rata-rata

mendapat 2,9%. Maka nelayan pemilik rata-rata mendapatkan 64% dan nelayan penggarap mendapatkan 36%.

Undang-Undang No 16 Tahun 1964 sistem bagi hasilnya ialah 60% Nelayan Pemilik dan 40% Nelayan Penggarap maka persentase pendapatan yang diterapkan untuk kapal 6 GT alat tangkap *purse seine* di Pelabuhan Perikanan Lampulo dari hasil bersih. Jika dibandingkan dengan peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 maka persentasenya masih lebih rendah

Dari hasil penelitian Wiga Yulia Utami (2015) di Provinsi Sumatera Barat persentase pendapatannya untuk kapal 30 GT nelayan pemilik mendapat 50% dan nelayan penggarap mendapat 50% (ABK mendapat 9,09%). Persentase pembagian hasil di Pelabuhan Perikanan Lampulo lebih besar dari persentase pembagian hasil di Provinsi Sumatera Barati. Jika jumlah ABK sebanyak 25 orang maka per ABK mendapat 0,36% per trip dan setiap trip ± 7 hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari hasil dan pembahasan diatas bahwa Sistem Pembagian hasil dari 7 kapal dengan ukuran kapal 6 GT menggunakan alat tangkap *purse seine* di Pelabuhan Perikanan Lampulo nelayan pemilik mendapat 64% dengan rincian Tauke Kapal untuk kapal KM. Naifa, KM. Camar Laut, KM. Sepakat dan KM. Syuhada sebesar 56,5%, persentase Tauke Bangku ialah 8%, sedangkan untuk kapal yang Tauke Kapal sekaligus menjadi Tauke Bangku ialah untuk kapal KM. Sejahtera, KM. Ilah Daya dan KM. Rayyan persentasenya ialah sebesar 64%, sedangkan nelayan penggarap mendapat 34% dengan rincian persentase Kaptan Kapal 7% dan persentase ABK 29%. Jumlah ABK rata-rata 10 orang per kapal. Jadi, 29% dibagi untuk masing-masing ABK per ABK rata-rata mendapat 2,9%. Dan kondisi ketahanan pangan rumah tangga ABK di Pelabuhan Perikanan Lampulo ialah kondisi rawan pangan dengan proporsi pengeluaran pangan sebesar 69% dan konsumsi energi sebesar 61%. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya ABK memanfaatkan waktu luang pada saat tidak melaut dengan membuat usaha tambahan seperti membudidayakan ikan dan juga memancing agar pendapatan rumah tangga dapat terbantu. Dan juga karena ketahanan pangan rumah tangga ABK masih tergolong rawan pangan. Pemerintah sebaiknya memberikan penyuluhan terkait pengetahuan gizi kepada seluruh anggota nelayan atau kepada ibu rumah tangganya agar pemenuhan gizi dapat terpenuhi sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang tahan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2010. Data Statistik Ketahanan Pangan. Jakarta.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Aceh, 2015. *Profil Pelabuhan Perikanan Lampulo*. Provinsi Aceh.

- Hardinsyah. 2011. Kecukupan Energi, Protein, Lemak Dan Karbohidrat dan Departemen Gizi, FK UI. Jakarta.
- Soekartawi. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- UPTD Pelabuhan Perikanan Lampulo, 2016. Data Bulanan Pelabuhan Perikanan Lampulo. Kota Banda Aceh.
- Yuliana Pramita, Zakaria Wan Abbas dan Adawiyah Rabiatul. 2013. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Banda Aceh*. Jurnal. Program Studi Agribisnis. Vol. 1 No 2 Hal 181-186.